

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) telah sering didengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam perkuliahan ilmu pemerintahan. Secara etimologis, kata *policy* berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (*Greek*), yang berarti negara-kota. Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno, 2012:19), istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan desain akhir.

Dalam tatanan pemerintahan, kebijakan memiliki peranan penting dalam peletakan dan perwujudan dari tujuan pemerintahan itu sendiri. Anderson berpendapat (dalam Winarno, 2012:19) bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Friedrich (dalam Winarno, 2002:18) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

Sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam berbagai literatur tentang kebijakan publik, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai istilah kebijakan publik. Kebijakan Publik menurut Tachjan (2000:15) merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya ada keterkaitan dan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada. Robert Presthus (dalam Sentosa, 2008:34) mengatakan bahwa “kebijakan dalam pengertian paling fundamental adalah suatu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud agar pilihan ini dapat dijelaskan, membenarkan, memedomani atau mengerangkan seperangkat tindakan, baik yang nyata maupun tidak”. Sedangkan menurut pandangan David Easton yang dikutip oleh Dye (dalam Subarsono, 2010:13) adalah “ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan definisi mengenai kebijakan publik merupakan suatu pilihan-pilihan yang disusun, dibentuk dan dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, dimana kebijakan tersebut memiliki nilai-nilai tertentu yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan-kebijakan publik tersebut memiliki bentuk-bentuknya atau keluaran seperti

program dan *outputs*, dimana keluaran itu untuk dilaksanakan oleh pemerintah sebagai implementor guna mencapai tujuan tertentu terhadap masyarakat.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut *Webster's Dictionary* (dalam Tachjan, 2011:23-24), kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai : "(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means to carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements*".

Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan "menyediakan atau melengkapi dengan alat". Jadi secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Edwards III (dalam Winarno, 2007:174) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Selanjutnya implementasi (pelaksanaan) merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses kebijakan. Seperti yang

dikatakan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya van Meter dan Horn dalam Winarno (2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan oleh implementor di lapangan dan bagaimana hasil serta tujuan kebijakan tersebut tercapai di masyarakat.

2.1.3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart Jr. (dalam Agustino, 2008:139), dimana mengatakan bahwa implementasi suatu proses dan suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*). Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang

diutarakan oleh Merrile Grindle (dalam Agustino, 2008:139) bahwa “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Pengertian keberhasilan di atas senada dengan pengertian efektivitas implementasi kebijakan yang menurut pendapat Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun pengertian efektivitas menurut Handyaningrat adalah sebagai berikut: “ Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Handyaningrat, 1995:16). Menurut Handyaningrat efektivitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Hal yang berkenaan dengan keberhasilan dan efektivitas suatu implementasi kebijakan di atas memiliki persamaan yaitu pencapaian hasil yang diinginkan. Berhasil berarti tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan dapat terealisasi. Efektif bermakna bahwa atas segala sumber daya yang digunakan dan kegiatan yang diusahakan sesuai dengan pencapaian tujuan yang diharapkan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki pengertian yang sama.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik, Ripley dan Franklin dalam bukunya “*Bureaucracy and Policy Implementation*” (1982:199:201) mengatakan bahwa, terdapat tiga langkah dominan yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu implementasi, yakni antara lain :

1. Keberhasilan suatu implementasi diukur melalui sudut pandang kepatuhan (*compliance*) yakni mengukur derajat kepatuhan bawahan terhadap atasan mereka dalam birokrasi dalam pelaksanaan mandat-mandatnya;
2. Keberhasilan suatu implementasi diukur melalui kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; dan
3. Keberhasilan suatu implementasi diukur melalui berhasilnya implementasi yang mengarah pada kinerja yang memuaskan dan dampak bagi semua pihak dalam program terutama penerima manfaat yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat Ripley dan Franklin tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu ukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik diukur dari tercapainya suatu kinerja dan dampak yang memuaskan. Sehingga dengan ini, peneliti memilih untuk mengukur pencapaian hasil atau tujuan dari program transmigrasi. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 pasal 3 bahwa tujuan transmigrasi adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya;
- 2) Peningkatan dan pemerataan pembangunan; dan
- 3) Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya penulis memilih kesejahteraan transmigran sebagai indikator pencapaian tujuan program transmigrasi.

Dalam buku “Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, Suharto (2004:1-5) mengatakan bahwa kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Konsepsi pertama dari

kesejahteraan sosial lebih tepat untuk dicermati dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan keluarga. Inti konsepsi pertama dari kesejahteraan sosial adalah “*kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial*”. Dengan demikian, istilah kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

2.1.4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk pencapaian hasil yang optimal dalam implementasi kebijakan publik, menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012:90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan;
2. Hubungan antar organisasi;
3. Sumber daya;
4. Karakter institusi implementor.

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2008:141-144) memandang bahwa proses implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam berbagai hubungan variabel. Variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Jika tujuan kebijakan tidak terlalu ideal atau bahkan mungkin terlalu utopis untuk dilaksanakan, maka agak sulit merealisasikan kebijakan tersebut.
2. Sumber daya;
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.
3. Karakteristik agen pelaksana;
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana;
Disposisi para pelaksana ini mencakup 3 (tiga) hal yang penting, yakni: (a) respons para pelaksana terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi para pelaksana, yakni referensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana;
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Lebih lanjut Edwards III (dalam Agustino, 2008:149) mengungkapkan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi;
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya implementasi tidak akan berjalan dengan lancar;

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis;
4. Struktur birokrasi, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2.1.5. Sumber Daya

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2008:98) terkait sumber daya menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980:53) mengungkapkan bahwa sumber daya dapat menjadi faktor penting bagi implementasi kebijakan, sumber daya penting tersebut antara lain staf yang memadai dan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Lebih lanjut menurut George C. Edwards III (1980:53-82) indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf ;
Kemungkinan bahwa sumber yang paling esensial bagi berjalannya suatu kebijakan publik adalah staf. Dimana tidak hanya masalah ketersediaan jumlah staf tetapi juga kemampuan untuk melaksanakan tugas. Sehingga staf memiliki dua indikator antara lain :
 - 1) Staf yang memadai; berhubungan dengan jumlah staf yang memadai untuk melaksanakan implementasi kebijakan publik.

- 2) Kemampuan; berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki staf agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
- b. Informasi;
- Informasi berwujud pada dua bentuk yakni :
- 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan; pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.
 - 2) Data atau informasi tentang kepatuhan personil-personil dengan peraturan-peraturan pemerintah; dalam implementasi kebijakan sering kali memerlukan informasi mengenai apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang atau tidak. Sehingga bentuk informasi tentang ketaatan ini menjadi penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Akan tetapi, data tentang ketaatan biasanya sulit diperoleh. Hal ini disebabkan kurangnya staf yang mampu memberikan informasi mengenai ketidaktaatan hukum yang mungkin dilakukan.
- c. Wewenang;
- Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan; mengajukan masalah-masalah ke pengadilan; mengeluarkan perintah kepada pejabat lain; menarik dana dari suatu program; menyediakan dana, staf, dan teknis kepada pemerintah daerah; membeli barang-barang dan jasa; atau memungut pajak. Suatu badan atau lembaga pemerintah memang memiliki wewenang yang formal dalam suatu hal, namun apakah wewenang tersebut dijalankan dengan efektif. Karena bisa saja suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif melaksanakannya. Sehingga menurut Edwards III pemerintah memerlukan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana lainnya agar wewenang yang dimilikinya dapat dijalankan dengan maksimal.
- d. Fasilitas ;
- Fasilitas fisik bisa menjadi faktor yang penting dalam implementasi. Tanpa ada fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas ini dapat berbentuk bangunan, peralatan, perlengkapan, bahkan lahan hijau menjadi fasilitas fisik yang mendukung implementasi.

Berdasarkan pemaparan sumber daya menurut Edwards III di atas, didapati bahwa tanpa sumber daya, kebijakan yang tertulis pada regulasi berbeda dengan kebijakan yang dijalankan di lapangan. Karena dengan pelaksanaan kebijakan di

lapangan, diperlukan berbagai faktor yang harus di penuhi agar kebijakan tersebut dapat berhasil, yakni salah satunya sumber daya.

2.1.6. Pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Program Transmigrasi

Menurut Said Zainal Abidin (2002:35) kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Begitu pula dengan program transmigrasi sebagai salah satu kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga diperlukan usaha yang baik dalam pengimplementasian kebijakan ini agar tujuan yang dimaksud dapat dicapai dengan baik. Maka dari itu, hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Seperti yang diungkapkan oleh Edwards III (dalam Agustino, 2006:86) yang menyatakan bahwa :

Salah satu hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah terpenuhinya resources. Resources dalam hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya berkenaan dengan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas, maka diharapkan kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan dan sasaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui teori tersebut, sumber daya memiliki peranan penting bagi terlaksananya kegiatan kebijakan yang efektif. Salah satunya, semakin kompleks kebijakan yang dilaksanakan dan semakin besar keahlian yang dibutuhkan dari para pelaksana dan semakin dituntut pula jumlah yang mencukupi bagi kebijakan tersebut. Selain itu, staf-staf tersebut juga wajib memiliki wewenang atas posisi

yang didudukinya dan mengerti bagaimana menggunakan wewenang tersebut. Serta didukung dengan ketersediaan fasilitas, baik fisik maupun non fisik. Bila seluruh faktor di atas terpenuhi dengan baik, maka program transmigrasi di Sungai Bulan C dapat berjalan dengan efektif. Beranjak dari penjabaran tersebut, maka terdapat hubungan yang mempengaruhi antara sumber daya terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

4.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Beni Arya Dwinanto pada tahun 2013 dengan judul "*Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Kayong Utara*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restorasi, dimana besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 57,2 % dan 42,8 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian relevan berikutnya dilakukan oleh Ghanis Ayu Annisaa pada tahun 2013 dengan judul "*Pengaruh Sumber Daya terhadap kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya terhadap kinerja pelayanan administrasi

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yaitu sebesar 43,16% dan tingkat koefisien korelasi adalah kuat.

Kedua penelitian terdahulu tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dalam mencari korelasi antara sumber daya terhadap masing-masing variabel Y di tiap penelitian yang diambil. Dari kedua penelitian ini, diperoleh hasil yang sesuai dengan pendapat dari Edwards III, Rondinelli dan Cheema, serta Meter dan Horn. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga menggunakan korelasi *product moment*.

Perbedaan yang didapati antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lokasi penelitian. Dimana penelitian pertama dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Kayong Utara, sedangkan penelitian kedua dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Kedua penelitian terdahulu sama-sama dilakukan di suatu badan lembaga, dan pada penelitian ini dilakukan di suatu lokasi transmigrasi Sungai Bulan C Kabupaten Kubu Raya. Maka dari itu, objek penelitian juga berbeda, dimana kedua penelitian terdahulu menggunakan para pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan, sedangkan penelitian ini memiliki objek penelitian yakni masyarakat transmigran di Sungai Bulan C.

2.3. Kerangka Pemikiran

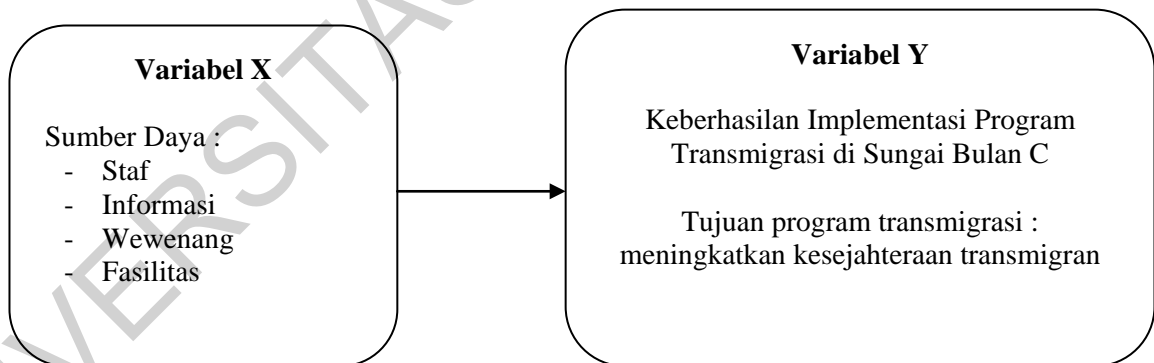
Berdasarkan teori yang telah disampaikan sebelumnya, para ahli mengatakan bahwa sumber daya mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan. Edwards III, Van Metter dan Van Horn, serta Rondinelli dan Cheema mengungkapkan bahwa sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan. Edwards III mengatakan bahwa kemungkinan besar syarat utama suatu implementasi kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang memadai baik sarana, staf, wewenang, dan informasi mengenai bagaimana operasionalisasi suatu kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui penulis memperkirakan bahwa penyebab kendala tersebut dikarenakan oleh faktor sumber daya yang digunakan dalam implementasi program transmigrasi di Sungai Bulan C. Oleh karena itu, penulis menentukan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti Tahun 2014

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sehingga berdasarkan identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan, kajian pustaka, dan kerangka pikir sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Ada pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi program transmigrasi di Sungai Bulan C Kabupaten Kubu Raya”

Selanjutnya sesuai dengan hipotesis yang telah dipaparkan di atas terdapat dua variabel, yakni sumber daya sebagai variabel bebas (X) dan keberhasilan implementasi program transmigrasi sebagai variabel terikat (Y).

3.4.1. Variabel Sumber Daya (X)

Sugiyono (2011:39) mengungkapkan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sumber daya.

3.4.1.1. Definisi Konseptual Sumber Daya

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2008:95) menegaskan bahwa sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangibile*).

3.4.1.2. Definisi Operasional Sumber Daya

Menurut George C. Edwards III (1980:53-82) indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf; yakni ketersediaan jumlah staf tetapi juga kemampuan untuk melaksanakan tugas. Sehingga staf memiliki dua indikator antara lain :
 - a) Jumlah atau kuantitas staf yang memadai;
 - b) Kemampuan yang dimiliki staf.
2. Informasi; yakni informasi yang antara lain berhubungan dengan:
 - a) cara melaksanakan kebijakan;
 - b) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang; yakni berupa kewenangan yang dimiliki oleh para pegawai Bidang Transmigrasi dan petugas lapangan Sungai Bulan C dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.
4. Fasilitas; merupakan sarana dan prasarana yang sangat diperlukan agar implementasi dapat berjalan dengan efektif. Fasilitas dapat berbentuk bangunan, peralatan, perlengkapan, bahkan lahan hijau menjadi fasilitas fisik yang mendukung implementasi.

3.4.2. Variabel Keberhasilan Implementasi Program Transmigrasi (Y)

Sugiyono (2011:39) mengungkapkan bahwa variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keberhasilan implementasi program transmigrasi.

2.4.2.1. Definisi Konseptual Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Definisi konseptual keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berdasarkan pada pendapat Edwards III (dalam Winarno, 2007:174) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dimana penulis memilih pengukuran pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

2.4.2.2. Definisi Operasional Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Tujuan atau pencapaian hasil dalam program transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 3 yang digunakan penulis adalah peningkatan kesejahteraan transmigran. Sehingga penulis menggunakan indikator kesejahteraan sebagai definisi operasional keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Suharto (2005:1-5) adapun indikator dari kondisi atau keadaan sejahtera yakni :

1. terpenuhinya kebutuhan jasmaniah;
2. terpenuhinya kebutuhan rohaniah; dan
3. terpenuhinya kebutuhan sosial.